PENDEKATAN INTERVENSI MIKRO SEBAGAI UPAYA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN PPKS PEREMPUAN: STUDI KASUS DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL MEDAN

Safrina Zafira Siregar¹, Fajar Utama Ritonga.² Agus Suriadi.³

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Kota Medan, Indonesia

Email : safrinazafira@students.usu.ac.id¹

fajar.utama@usu.ac.id²

agus4@usu.ac.id³

ABSTRAK

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Di Kota Medan, permasalahan Gepeng menjadi isu sosial yang signifikan. Data dari Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 538 orang Gepeng yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, menggambarkan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini (dinsos.medan.go.id) Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan PPKS, khususnya perempuan, melalui pendekatan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberian motivasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap Gepeng perempuan di Kota Medan. Melalui Praktek Kerja lapangan (PKL), peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan harapan baru bagi para Gepeng untuk memulai usaha mandiri, seperti usaha penyedia paket data, memasak, dan kerajinan tangan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengurangan jumlah Gepeng di Kota Medan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Kata Kunci : Gelandangan, Pengemis, PPKS, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Homeless and Beggars (Gepeng) are part of the Beneficiaries of Social Welfare Services (PPKS) who require special attention from both the government and society. In the city of Medan, the issue of Gepeng has become a significant social concern. Data from the Medan City Social Service in 2023 recorded 538 Gepeng individuals whose basic needs have been met, reflecting the government's efforts in addressing this problem (dinsos.medan.go.id). This study aims to empower PPKS, particularly women, through an approach focused on skill development and motivation enhancement. The research

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

employed a qualitative method, using observation and interviews with female Gepeng in Medan. Through Field Work Practice (PKL), the researcher was directly involved in empowerment activities. The results indicate that this approach has provided new hope for the Gepeng to initiate independent businesses, such as mobile data services, cooking, and handicrafts. This empowerment not only improved their skills but also strengthened their self-confidence and economic independence. Thus, this study contributes to reducing the number of Gepeng in Medan and enhancing their social welfare.

Keywords: Homeless, Beggars, PPKS, Women's Empowerment, Social Welfare

PENDAHULUAN

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan permasalahan sosial yang sering ditemukan di wilayah perkotaan dan menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah mereka yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap, serta hidup mengembara di tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta secara terbuka demi belas kasihan orang lain.

Menurut Fitri (2022), Gepeng merupakan simbol dari ketidakberdayaan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan pendidikan dan keterampilan hingga masalah sosial budaya dan mental. Pandangan ini menunjukkan bahwa permasalahan Gepeng ini terjadi dikarenakan tidak hanya karena suatu faktor sederhana, melainkan dari banyak faktor. Selain itu Idza (2023), menambahkan bahwa keberadaan Gepeng di jalanan kota tidak hanya berdampak pada ketertiban umum tetapi juga menimbulkan stigmatisasi dan memperkuat siklus kemiskinan.

Kemiskinan menjadi latar belakang utama timbulnya gelandangan dan pengemis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2023 adalah 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari total penduduk. Di provinsi Sumatera Utara sendiri, angka kemiskinan mencapai 8,17% atau sekitar 1,15 juta jiwa per September 2023, sementara di Kota Medan, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,50% dari total penduduk kota tersebut (BPS Sumut & medan, 2023).

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia mengalami permasalahan serius terkait PPKS, khususnya Gepeng. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis di Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan, penulis menemukan bahwa Gepeng menjadi kelompok PPKS terbanyak yang ditampung. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran dikarenakan mereka berjumlah tidak sedikit maka dari itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan terhadap mereka yang lebih maksimal.

Urgensi dari kegiatan ini didasari oleh fakta bahwa semakin banyaknya Gepeng yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial tanpa kejelasan masa depan dapat memperpanjang siklus ketergantungan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan pemberdayaan agar setelah meninggalkan rumah perlindungan sosial, para Gepeng—terutama perempuan—memiliki keterampilan dan motivasi untuk hidup mandiri.

Secara teoritis, upaya ini sejalan dengan pendekatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan dalam pekerjaan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori Munawir Yusuf mengenai tahapan rehabilitasi sosial, yaitu: rehabilitasi, resosialisasi, dan pembinaan lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan proses terpadu dalam membantu individu mengatasi kondisi ketergantungan sosial dan membangun fungsinya secara mandiri. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi dasar, resosialisasi mengembalikan peran sosial individu, dan pembinaan lanjut memastikan kontinuitas perubahan positif setelah klien keluar dari lembaga (Yusuf, 2005)

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktik lapangan Kerja (PKL) ini adalah intervensi mikro dengan pendekatan *casework*. Intervensi dalam konteks pekerjaan sosial didefinisikan sebagai tindakan terencana oleh pekerja sosial untuk menimbulkan perubahan pada individu, kelompok, atau masyarakat, baik melalui praktik langsung (*direct practice*) maupun tidak langsung (*indirect practice*) (Johnson, 2001 dalam Zulfah, 2024)

Menurut Charles Zastrow (dalam Hutagaol & Sinaga, 2024), *casework* merupakan metode pekerjaan sosial yang dilakukan secara langsung antara pekerja sosial dan klien melalui hubungan profesional yang bertujuan membantu klien menyelesaikan masalah pribadi maupun sosialnya, meningkatkan fungsi sosialnya, dan mencapai kesejahteraan emosional dan sosial.

Dalam praktiknya, *casework* memiliki beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Engagement, Intake, Contract

Tahapan ini merupakan proses awal untuk membangun hubungan saling percaya antara klien dengan pekerja sosial. Praktikan mendengarkan pengalaman hidup klien dengan empati dan tanpa menghakimi. Dalam tahapan ini, praktikan membangun suasana yang aman dan nyaman agar klien dapat membuka diri dan merasa diterima. Setelah dilakukannya tahap pengenalan awal, dilakukan kontrak intervensi berupa kesepakatan waktu, tujuan, dan bentuk intervensi yang akan dilakukan.

2. Tahap Assessment

Pada tahap ini, informasi mengenai tentang latar belakang, ekonomi, serta penyebab klien kehilangan mata pencahariannya hingga informasi mengenai bagaimana akhirnya hidup di jalanan dikumpulkan secara menyeluruh. Praktikan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung, serta alat bantu asesmen *Ecomap*, yaitu diagram visual yang menggambarkan hubungan klien dengan lingkungan sosialnya. *Ecomap* memungkinkan pekerja sosial melihat sumber dukungan, konflik dan stress dalam sistem sosial klien secara lebih utuh (dalam JPPMI, 2024).

3. Tahap Perencanaan (Planning)

Setelah melalui tahap asesmen, praktikan dan klien secara berkolaboratif merumuskan rencana intervensi. Dalam kasus ini, klien menyatakan keinginan untuk memulai usaha penjualan paket data. Maka klien dan praktikan dapat membuat rencana bagaimana cara informasi mengenai penjualan paket data dan penggunaan teknologi dasar.

4. Tahap Intervensi

Pelaksanaan dari tahap sebelumnya dilakukan dalam tahap intervensi. Praktikan memberikan pendampingan langsung melalui bimbingan teknis (cara membeli dan menjual paket data), serta penguatan motivasi.

5. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan intervensi tercapai. Praktikan mengamati perubahan perilaku dan motivasi klien. Evaluasi juga bertujuan untuk menyesuaikan strategi bila terdapat hambatan baru.

6. Tahap Terminasi

Terminasi adalah tahapan penutupan hubungan profesional antara pekerja sosial dan klien. Dalam tahap terminasi, dilakukan refleksi terhadap seluruh tahapan yang sudah dilalui, mencakup perubahan positif, tantangan yang dihadapi, dan potensi klien ke depan. Dukungan moral dan motivasi turut diberikan praktikan kepada klien, serta menyampaikan kesiapan klien untuk melanjutkan proses kehidupan secara mandiri dan berdaya.

Metode asesmen utama yang digunakan dalam praktik adalah Ecomap, sebuah alat visual yang digunakan untuk memetakan relasi antara individu dengan sistem sosial di sekitarnya, seperti keluarga, teman, lingkungan kerja, serta faktor eksternal lainnya yang memiliki pengaruh kepada klien. Ecomap efektif digunakan dalam pekerjaan sosial karena memberikan gambaran komprehensif tentang jaringan sosial yang mendukung atau menghambat proses pemulihan klien (dalam JPPMI, 2024)

TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Rumah Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kota Medan, Jalan Bunga Turi II, Kecamatan Sidomulyo, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Senin, Kamis dan Jum'at, 03 Maret 2025 s/d 20 Juni 2025

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan yang dilakukan selama Praktik Lapangan Kerja (PKL) di Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Medan mencakup serangkaian aktivitas lapangan yang dilakukan secara sistematis dan bertahap dalam kurun waktu 03 Maret 2025 hingga 20 Juni 2025. Kegiatan diawali dengan proses pengenalan program pelayanan sosial, serta peraturan internal lembaga. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada praktikan mengenai alur layanan dan fungsi lembaga terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya gelandangan dan pengemis (Gepeng).

Setelah melewati masa pengenalan, praktikan mulai terlibat secara aktif dalam kegiatan asesmen sosial terhadap klien yang baru masuk ke rumah perlindungan sosial. Praktikan mendampingi pekerja sosial dalam melakukan wawancara, observasi, dan pengisian formulir asesmen awal untuk menggali latar belakang, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi klien. Dalam kegiatan ini, digunakan alat bantu asesmen yaitu Ecomap untuk memetakan hubungan sosial klien dengan lingkungan sekitar/

Selain asesmen, praktikan juga berpartisipasi dalam kegiatan pengantaran PPKS ke Dinas Sosial setempat untuk proses pemulangan, serta ikut serta dalam kegiatan penjangkauan dan asesmen lapangan terhadap PPKS yang baru saja terjaring oleh tim gabungan. Praktikan membantu pengumpulan informasi, dan pengolahan hasil asesmen yang dilakukan di tingkat kecamatan.

Pada minggu-minggu berikutnya, praktikan mulai menjalankan intervensi individu terhadap klien perempuan Gepeng dengan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial mikro (casework). Intervensi dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan casework mulai dari engagement, asesmen, perencanaan, intervensi, evaluasi, hingga terminasi. Praktikan juga memberikan pendampingan serta edukasi terkait rencana usaha mikro berupa penjualan paket data.

Secara keseluruhan, kegiatan PKL disusun dengan mengikuti prinsip kerja sosial yang mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, partisipasi aktif klien, serta keberlanjutan dalam proses rehabilitasi sosial. Metode kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi praktikan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemulihan sosial klien di Rumah Perlindungan Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Praktik Lapangan Kerja (PKL) yang dilakukan di rumah Perlindungan Sosial, membawa pengalaman langsung bagi praktikan dalam menghadapi realitas sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya kelompok gelandangan dan pengemis (Gepeng). Dalam pelaksanaan PKL, praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan intervensi mikro kepada salah satu klien perempuan yang terjaring oleh pihak Dinas Sosial.

Perubahan perilaku dan orientasi hidup klien dalam proses intervensi dapat dipahami melalui perspektif teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mencapai tahapan tertinggi, yaitu aktualisasi diri (self-actualization). Kelima tingkat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang (sosial), penghargaan (esteem), dan aktualisasi diri (dalam Annajih, Saidah, & Taufik, 2023).

Dalam kasus klien PPKS ini, dapat dilihat bahwa selama hidup di jalanan, klien berkuat pada dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis (makanan, tempat tinggal, kebersihan) dan kebutuhan akan rasa aman. Setelah berada di Rumah Perlindungan Sosial dan menerima layanan dasar seperti makanan, tempat tidur, serta lingkungan yang relatif aman, klien perlahan mulai bergerak ke tingkat kebutuhan sosial, yaitu keinginan untuk dihargai dan diterima.

Konsep aktualisasi diri Maslow menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena menggambarkan kondisi psikologis klien yang mulai tumbuh secara holistik-dari ketergantungan menuju kemandirian. Seperti yang dijelaskan oleh Annajih et al. (2023), individu yang mencapai aktualisasi cenderung menunjukkan karakteristik seperti orientasi pada tujuan, otonomi, dan penghargaan terhadap hidup.

Melalui pendekatan casework, praktikan melakukan serangkaian tahapan intervensi mulai dari engagement hingga tahap terminasi. Hasil utama dari intervensi menunjukkan bahwa klien mengalami perubahan signifikan dalam cara pandangya terhadap masa depan. Sebelumnya, klien mengalami ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kehilangan arah setelah mengalami kegagalan dalam usaha kecil yang pernah ia jalani. Namun, seiring proses asesmen dan pendampingan, klien mulai mengidentifikasi kembali potensi dirinya khususnya minat untuk menjalankan usaha penjualan paket data (kuota internet).

Dalam tahap intervensi, praktikan memberikan informasi mengenai penyedia layanan isi ulang kuota terpercaya, serta memberikan motivasi tentang pentingnya disiplin dalam mengelola sebuah usaha. Pendekatan ini membangkitkan semangat baru pada klien, di mana ia mulai menunjukkan semangat, rasa percaya diri, dan tanggung jawab terhadap rencana hidupnya.

Proses terminasi dilakukan dengan cara bertahap dengan memfokuskan pada refleksi, dukungan moral, dan penguatan motivasi. Praktikan menyimpulkan bahwa meskipun klien masih memerlukan bimbingan lebih lanjut, namun secara psikososial ia telah menunjukkan kesiapan untuk keluar dari lembaga dan kembali pada masyarakat dengan rencana usaha yang lebih baik. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya intervensi berbasis potensi klien sebagai pendekatan dalam rehabilitasi sosial.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian oleh Hutagaol dan Sinaga (2024), yang menyatakan bahwa pendekatan casework efektif untuk membangun kepercayaan diri klien dan mendorong proses transformasi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan pemberdayaan yang dilakukan melalui intervensi langsung sejalan dengan prinsip rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Kegiatan Praktik Lapangan Kerja (PKL) yang dilaksanakan di RUMah Perlindungan Sosial, membuktikan bahwa pendekatan intervensi mikro dengan metode casework sangat efektif dalam proses pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui tahapan intervensi yang sistematis-mulai dari engagement hingga terminasi-praktikan berhasil mendorong klien untuk menemukan kembali potensi diri dan merancang kembali harapan yang lebih mandiri melalui usaha penjualan paket data.

Pendekatan ini berhasil mengubah kondisi psikososial klien dari ketidakberdayaan menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk mandiri secara ekonomi. Hasil dari intervensi menunjukkan bahwa klien mengalami perubahan signifikan baik dalam aspek fungsi sosial maupun dalam pencapaian kebutuhan aktualisasi diri sebagaimana dijelaskan dalam teori kebutuhan Maslow. Pemberdayaan ini juga sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial yang menekankan pada kemandirian dan pemberdayaan kembali ke masyarakat.

Oleh karena itu, program serupa perlu dikembangkan dan dilanjutkan secara berkelanjutan untuk mendorong transformasi sosial PPKS yang tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi juga mampu membangun kehidupan yang produktif dan bermartabat

DAFTAR PUSTAKA

Annajih, M. Z. H., Sa'idah, I., & Taufik. (2023). Konsep self-actualized Abraham Maslow: Perspektif psikologi sufistik. *Edu Consilium: Jurnal BK Pendidikan Islam*, 4(1), 43-52. <https://doi.org/10.19105/ec.v1i1.1808>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id>

Dinas Sosial Kota Medan. (2023). *Laporan kinerja Dinas Sosial tahun 2023*. <https://dinsos.medan.go.id>

Fadhilah, A., Ramdani, R., & Rizki, M. F. (2024). Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya. *Community Development Journal*, 5(3), 5115-5119. [https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652:contentReference\[oaicite:0\]{index=0}](https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652:contentReference[oaicite:0]{index=0})

Hutagaol, S. T., & Sinaga, T. P. (2024). Model intervensi mikro dalam pemberdayaan PPKS perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 3(2), 52-58.

Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum: Analisis dampak dan solusi. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 145-161. [https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859:contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859:contentReference[oaicite:1]{index=1})

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Zulfah, N. (2024). Pendekatan intervensi pekerja sosial dalam menangani perempuan PPKS. *Jurnal Pelayanan Sosial*, 10(1), 25-34.